



**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PERMEN-KP/2015**

RENCANA STRATEGIS

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2015-2019**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2015





**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PERMEN-KP/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PERMEN-KP/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, perlu menyusun perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 25/PERMEN-KP/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga Lampiran III menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PERMEN-KP/2015	iv
Daftar Isi	ix
LAMPIRAN I	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi	7
D. Permasalahan	12
E. Lingkungan Strategis	16
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi	18
B. Misi	18
C. Tujuan.....	19
D. Sasaran Strategis.....	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	24
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	27
C. Kerangka Regulasi.....	34
D. Kerangka Kelembagaan	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	37
B. Kerangka Pendanaan	39
BAB V PENUTUP	40
LAMPIRAN II	
Kerangka Regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.....	41
LAMPIRAN III	
Kerangka Pendanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Dengan demikian, prinsip dasar Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan kelautan dan perikanan.

Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam bentuk:

1. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.
3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai melalui perwujudan bangsa yang (1) *berdaulat*, yaitu bangsa yang mampu hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan berdaya saing; (2) *Mandiri*, yaitu berkurangnya ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia yang berkualitas dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) Berkepribadian dan berkebudayaan, yaitu menyadari jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk membangun perekonomian Indonesia

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ideologi TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma pembangunan (*paradigm shift*), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.

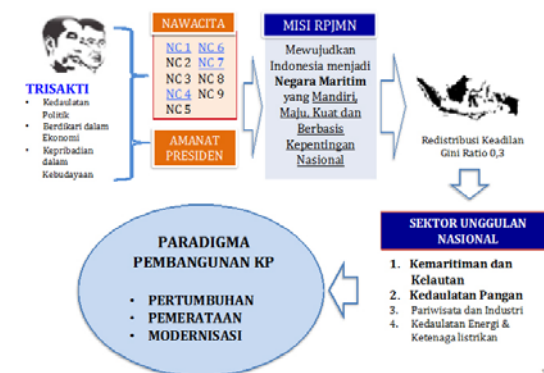
Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L.

B. KONDISI UMUM

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, KKP telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil sebagai berikut :

1. PDB Perikanan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,97%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang besarnya 5,1% dan pertumbuhan PDB Pertanian dalam arti luas yang besarnya 3,3%.

Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2014 mencapai Rp. 340,3 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya disektor hilir. Melihat pertumbuhan yang terus positif dan tingginya nilai PDB Perikanan serta besarnya potensi ekonomi sektor kelautan, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang prospektif untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

2. Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 14,52 juta ton (termasuk rumput laut). Peningkatan produksi perikanan setiap tahun tersebut telah mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat.
3. Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,5 juta ton. Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 42 kabupaten/kota.
4. Nilai Tukar Nelayan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 104,3 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 101,36. Fluktuasi NTN/NTPi salah satunya dipengaruhi faktor cuaca, indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi. Namun demikian nilai NTN secara rata-rata dan bulanan masih di atas 100, artinya nelayan dan pembudidaya ikan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-harinya.
5. Ekspor hasil perikanan tahun 2014 mencapai USD 4,64 miliar. Capaian nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor komoditas udang yang mencapai USD 2,09 miliar dan diikuti oleh komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,69 miliar pada tahun 2014.
6. Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 37,89 kg/kapita. Capaian tersebut didukung oleh kampanye nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi.
7. Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola pada tahun 2014 mencapai 33 pulau. Kegiatan yang dilakukan merupakan pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar melalui penguatan sarana dan prasarana dasar.
8. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2014 mencapai 7,8 juta ha. Dengan demikian, sampai tahun 2014, telah ditetapkan kawasan konservasi perairan dengan luasan mencapai 16,45 juta ha. Sampai tahun 2019, telah ditargetkan perluasan kawasan konservasi perairan hingga mencapai luasan 20 juta ha.

9. Wilayah perairan bebas *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP tahun 2014 mencapai 38,63%. Capaian strategis pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2010-2014 diantaranya adalah hasil operasi kapal pengawas dalam rangka penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Kinerja pengawasan didukung oleh kerjasama pengawasan dengan TNI AL, POLRI dan BAKORKAMLA, kerjasama penegakan hukum dengan instansi terkait, kerjasama internasional di bidang kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas pengawasan SDKP melalui pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan kelembagaan dan SDM Pengawasan.
10. Jumlah kasus penolakan ekspor per negara mitra pada tahun 2014 terdapat 4 kasus, atau dapat dijaga untuk tidak melampaui lebih dari 10 kasus. Hal ini didukung dengan adanya upaya KKP untuk peningkatan sistem karantina ikan dan jaminan mutu produk perikanan yang diekspor.
11. Jumlah hasil litbang yang inovatif pada tahun 2014 mencapai 105 hasil litbang, yang terdiri dari 29 litbang produk biologi, 25 litbang komponen teknologi, 33 paket teknologi, 5 inovasi teknologi, 3 rancang bangun, 10 model kelembagaan/pengelolaan/pengolahan garam. Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan tersebut memiliki kebaruan sebagian atau kebaruan seluruhnya, yang akan dipergunakan dalam mengembangkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran berbasis IPTEK.
12. Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten di bidang KP terhadap total peserta mencapai 96,22%. Selama tahun 2010-2014, setiap tahunnya jumlah peserta didik yang terserap di dunia usaha dan dunia industri, jumlah SDM KKP yang meningkat kompetensinya, dan jumlah kelompok pelaku utama/usaha perikanan yang diberikan penyuluhan berfluktuatif. Secara kumulatif pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan telah mampu menyediakan sebanyak 135.653 SDM KP yang kompeten. Capaian tersebut merupakan kontribusi hasil capaian empat jenis kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan dukungan kesekretariatan.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sampai tahun 2014 telah dilakukan penyusunan kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi aspirasi masyarakat, antara lain yakni :

1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyepakati 4 (empat) norma hukum penting, yakni: (i) pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional; (ii) penataan investasi; (iii) sistem perizinan;

dan (iv) pengelolaan kawasan konservasi laut nasional. Pemberdayaan masyarakat diperkuat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta dengan pemerintah dan dunia usaha. Dengan norma hukum ini, maka masyarakat dapat mengambil inisiatif mengusulkan rencana zonasi. Undang-undang perubahan ini juga telah memberikan pengakuan hak asal-usul masyarakat hukum adat untuk mengatur wilayah perairan yang telah dikelola secara turun temurun. Dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat. Sementara bagi nelayan tradisional yang memiliki wilayah penangkapan ikan secara tradisional diakui dengan cara memasukkan wilayah tersebut sebagai subzona dalam rencana zonasi sehingga memiliki perlindungan hukum secara paripurna.

2. Untuk memberikan landasan yang kuat terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang memuat beberapa materi yang sangat penting menyangkut penyelenggaraan pembangunan kelautan ke depan, antara lain (i) wilayah laut, (ii) pembangunan kelautan, (iii) pengelolaan kelautan, (iv) pengembangan kelautan, (v) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, (vi) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, (vii) tata kelola dan kelembagaan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, selama periode Oktober-Desember 2014 KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama terkait dengan upaya pemberantasan *IUU Fishing*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (yang melarang *transshipment*), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) dan Ikan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Di samping itu untuk memperkuat kinerja dalam rangka pemberantasan *IUU fishing*, pada tahun 2014 juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian

Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, alih Muatan (*Transshipment*) di Laut, dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) asing.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan, serta mempertimbangkan Lobster, Kepiting dan Rajungan telah mengalami penurunan populasi sehingga perlu menjamin keberadaan dan ketersediaan stok, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*panulirus spp*), Kepiting (*scylla spp*) dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*), yang melarang penangkapan species tersebut dalam kondisi bertelur dan mengatur ukuran yang boleh ditangkap.

Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang sebagian dirubah sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 dan penjelasannya yang mengamanahkan bahwa dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor. Diharapkan melalui penerapan peraturan tersebut, dapat dilakukan penataan kembali pengelolaan perikanan untuk kelestarian sumber daya ikan, pengurangan tekanan terhadap sumberdaya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pengaturan selektifitas alat penangkapan ikan, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan Negara kepulauan yang berdaulat dan sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

C. POTENSI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai

poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (the global supply chain system) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan *mangrove*, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), SDA tak terbaharukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau *Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013). Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum terekplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km² (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25 %, dan kurang baik sebesar 30,45 % (LIPI, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbaharukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda

dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor kelautan yang belum tergarap secara optimal. Dengan melihat besarnya potensi dan manfaat laut Indonesia, sudah seharusnya kelautan Indonesia menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga meningkat terus sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis, seperti ikan kerapu, kakap, dan baronang; budidaya tambak seperti udang dan bandeng; serta budidaya air tawar seperti ikan mas, gurame, patin, dan lain-lain.

Potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 Ha, termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan tingkat pemanfaatan 302.130 Ha (10,7%). Secara spesifik, khusus untuk perairan umum daratan (danau dan waduk), luas secara keseluruhan tercatat 518.240 Ha. Bila diasumsikan 10% dari luasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk perikanan budidaya, maka akan didapat luasan potensial budidaya air tawar di waduk dan danau sebesar 51.824 Ha. Luasan budidaya KJA di perairan umum saat ini tercatat 1.563 Ha atau 3%. Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air tawar disebabkan karena belum terkelolanya secara optimal potensi tersebut akibat tumpang tindihnya pemanfaatan potensi lahan budidaya air tawar, serta belum terbukanya secara mudah akses menuju kawasan potensial budidaya air tawar tersebut.

Potensi luas areal budidaya air payau saat ini tercatat 2.964.331 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 650.509 Ha (21,9%). Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air payau disebabkan karena pengelolaan kawasan potensial budidaya air payau masih berada/bersinggungan dengan kawasan mangrove, sehingga pemanfaatan potensi lahan budidaya air tersebut harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan hutan mangrove. Selain itu belum terbukanya secara mudah akses menuju kawasan potensial budidaya air payau serta minimnya prasarana penunjang lainnya di kawasan potensial, menyebabkan pemanfaatan masih relatif kecil.

Potensi luas areal budidaya laut saat ini tercatat 12.123.383 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 325.825 Ha (2,7%). Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya laut disebabkan karena belum tersedianya payung hukum berupa peraturan yang menaungi Tata Ruang pengelolaan/pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatannya. Hal ini penting bagi pelaku usaha sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha dibidang budidaya laut. Selain itu tingginya modal yang diperlukan serta ketersediaan sarana penunjang yang terbatas, menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam usaha budidaya ikan laut.

Potensi luas areal budidaya rumput laut saat ini tercatat 1,1 juta Ha atau 9% dari seluruh luas kawasan potensial budidaya laut yang sebesar

12.123.383 Ha. Adapun tingkat pemanfaatannya diperkirakan baru mencapai 25%. Adapun jenis rumput laut yang dimiliki Indonesia tercatat 555 jenis rumput laut. Beberapa kendala dalam pengembangan budidaya rumput laut adalah terkait kualitas bibit rumput laut, penyakit, akses pasar serta tata niaga produk.

Perkembangan budidaya dalam dua dekade terakhir ini lebih cepat dari penangkapan sehingga produksi budidaya melampaui produksi perikanan tangkap sejak tahun 2010. Masih luasnya lahan yang potensial untuk budidaya memberikan harapan akan meningkatnya produksi budidaya di waktu yang akan datang. Sebagian dari produk budidaya juga sudah mulai diekspor seperti kerapu dan gurame khususnya untuk tujuan negara Asia Tenggara. Budidaya rumput laut diharapkan terus meningkat tidak hanya untuk kepentingan konsumsi tetapi juga untuk kepentingan lain seperti untuk kosmetik, dan lain-lain.

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat bergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Data produksi pakan pellet mandiri saat ini tercatat 35.000 ton dari 1,3 juta ton (2,7%) dari keseluruhan pakan ikan yang digunakan untuk produksi 2,6 juta ton ikan air tawar. Diprediksi pada tahun 2019, dengan target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 592 ribu ton pakan pellet mandiri dari 5,92 juta ton (10%) dari keseluruhan kebutuhan pakan.

Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung ikan impor antara lain (a) Tepung maggot (ulat lalat hitam/black soldier) menggunakan media PKM (palm kernel meal) dari kebun sawit, (b) Daging kerang hijau, (c) Ikan rucah atau ikan sisa olahan, (d) Ikan pemakan plankton yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, (e) Bahan fermentasi berbagai tumbuhan serta (f) Cacing lumbricus dengan media sampah organik.

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Keberadaan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagai legalitas dan dasar eksistensi pengawasan SDKP kedepan. Disamping ketentuan nasional tersebut, landasan lain yang tidak kalah penting yaitu ketentuan maupun resolusi Internasional yang mengamankan untuk pengawasan dalam kerangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab.

Potensi untuk pengawasan SDKP yaitu ketersediaan SDM Pengawasan yang saat ini dimiliki yaitu 679 Pengawas Perikanan, PPNS Perikanan sebanyak 456 orang, Awak Kapal Pengawas sebanyak 279 orang dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 205 orang, dengan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan tersebut diharapkan lebih memperkuat pengawasan SDKP kedepan. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait antara KKP dan TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Mahkamah Agung, Kejaksaan dalam rangka penanganan pelanggaran telah terjalin dengan baik, kerjasama tersebut selama ini diimplementasikan melalui kelembagaan, prosedur dan operasional yang dilakukan selama ini.

Keberadaan dan fungsi kapal pengawas sebagai sarana utama dalam pengawasan di laut yang dimiliki sebanyak 27 unit kapal dengan berbagai ukuran dan type serta speedboat pengawasan sebanyak 89 unit berpotensi untuk mendukung dalam pengawasan SDKP kedepan. Selain sarana dan prasarana tersebut telah tersedia alat pemantauan kapal perikanan/VMS yang mampu memantau pergerakan kapal perikanan dan fasilitas penunjang seperti dermaga, kantor dan sarana prasarana pengawasan lainnya.

Tumbuh dan kembangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan SDKP secara lestari dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia menjadi potensi mendukung pengawasan SDKP. Bentuk dukungan tersebut salah satunya melalui kearifan local di masing-masing daerah seperti awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laot di Aceh, Ninik Mamak di Sumatera Barat, Lubuk Larangan di Jambi dan masih banyak kearifan local lainnya.

Kegiatan Pendidikan dilaksanakan melalui proses belajar dengan pendekatan *teaching factory* terdiri dari 60-70% praktek dan 30-40% teori. Saat ini Pendidikan KP memiliki 1 Perguruan Tinggi, 9 (Sembilan) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), 3 (tiga) Politeknik Kelautan dan Perikanan, yang tersebar di wilayah nusantara. Tenaga pengajar satuan pendidikan KP berjumlah 429 Orang terdiri dari 223 guru dan 206 Dosen. Satuan pendidikan KP menerima peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 40 % dari total penerimaan peserta didik setiap tahunnya.

Kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 429 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 33

Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini pusat pelatihan KP memiliki 75 widyaiswara dan 72 orang instruktur yang tersebar di masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan KP.

Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat perikanan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasar hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara meliputi pelatihan teknis, struktural aparatur, pelatihan fungsional, dan pelatihan prajabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Perikanan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan per 10 Juli 2015, total penyuluh perikanan sebanyak 13.621 orang, terdiri dari 3.249 penyuluh PNS, 1285 penyuluh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 8.749 penyuluh swadaya, 205 PPB Daerah, 40 penyuluh swasta, dan 93 penyuluh honorer.

D. PERMASALAHAN

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing*. Selain itu, praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari *IUU fishing* di perairan Arafura diperkirakan mencapai Rp 11–17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negara-negara di dunia akibat *IUU fishing* mencapai US\$ 10–23,5 miliar (Agnew dkk, 2005). Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan

atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional dalam penanggulangan kegiatan *IUU fishing*. Masalah *IUU fishing* juga terkait dengan perbatasan dengan negara tetangga, khususnya terkait nelayan tradisional yang melanggar lintas batas ke negara lain. Meskipun upaya untuk edukasi dan peningkatan kesadaran nelayan RI mengenai batas-batas laut sudah dilakukan namun kemungkinan nelayan tradisional untuk melintas batas dan melakukan pelanggaran ke negara lain masih ada.

Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa masalah kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ($\pm 80\%$), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap

hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*). Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (non tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pegaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang

berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor (termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah. Sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau-pulau (*Archipelagic State*) dimana laut Indonesia lebih luas dari daratan, laut menjadi sangat vital dalam pemerataan pembangunan nasional. Melalui visi misi Presiden, diharapkan laut dapat menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil didalamnya, sekaligus sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan).

E. LINGKUNGAN STRATEGIS

KKP yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT (*strength-weakness-opportunities-threats*).

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995, FAO Compliance 1993, Port State Measures Agreement 2009, Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action, Millennium Development Goals kelautan dan perikanan, Sustainable Development Goals kelautan dan perikanan, The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1994, serta *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Cooperation (APCE)*, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai negara yang telah ikut mengadopsi hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia dituntut harus mampu memanfaatkannya demi menjamin keberlangsungan kepentingan nasional di bidang pembangunan perikanan.

Sedangkan lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni (1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Inpres, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan (termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), (4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, (5) perkembangan iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat

eksploitasi dan status stok ikan di suatu WPPNRI, (6) kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (7) sistem pengawasan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan maupun kelemahan, antara lain meliputi (1) Sumberdaya ikan, habitat, dan produksi; (2) Pengelolaan perikanan nasional; (3) Geografi; (4) Kependudukan; (5) Ekonomi nasional; (6) Ideologi nasional; (7) Sosial-budaya nasional; (8) Politik, tata kelola pemerintahan, kebijakan, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan penegakan hukum; (9) Pertahanan dan keamanan nasional; (10) IPTEK dan informasi nasional; (11) Ketersediaan bahan baku; (12) Konektivitas antar pulau; (13) Manajemen industri (teknologi produksi, SDM, pemasaran); (14) Permintaan hasil perikanan dalam negeri (termasuk UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan); (15) Pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan; dan (16) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang ataupun ancaman adalah (1) Permintaan hasil perikanan dunia; (2) Sumberdaya alam, praktek dan tingkat produksi perikanan dunia, (3) Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan regional dan dunia; (4) Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; (5) Kerjasama bilateral, regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO); (6) Praktek *Illegal fishing* global; (7) Sumberdaya alam, praktik dan tingkat produksi dan pengelolaan perikanan dunia, pasok hasil perikanan dunia; dan (8) Kependudukan dunia.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian eko-

nomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (Sovereignty), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (Sustainability), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (Prosperity), yakni :

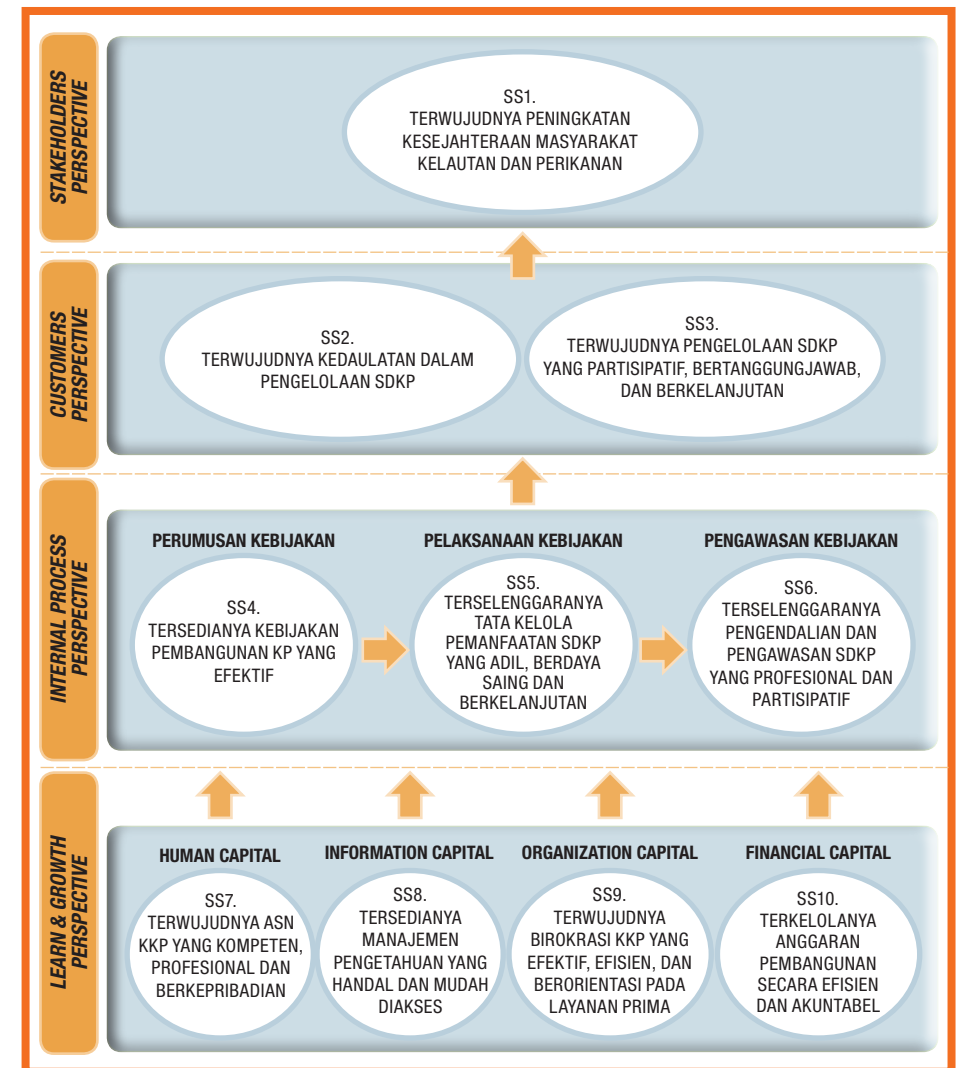
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan



D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan “Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*, sebagai berikut:

PETA STRATEGI KKP 2015-2019



1. Stakeholders Perspective

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

2. **Customer Perspective**

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
- e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
- g. Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

3. **Internal Process Perspective**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.

- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
 - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

4. **Learning and Growth Perspective (input)**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah:

1. Agenda/Nawa Cita ke-1 :

Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

- a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu
- b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional
- c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat
- d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan
- f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kalautan dan perikanan

2. Agenda/Nawa Cita ke-4:

Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan *Illegal/IUU Fishing*

- a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan.
- b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
- d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/Nawa Cita ke-6 :

Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan.
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7 :

Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi.

- c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub Agenda : Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

- a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
- b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (*one map policy*) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
- c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
- d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.
- e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan KKP adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok nasional sebagai berikut:

No.	Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Unggulan	Baseline 2014	Sasaran 2019
1	Kedaulatan Pangan • Produksi Ikan (juta ton)	12,4	18,8
2	Maritim dan Kelautan		
	• Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar ■ Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan	52%	87%
	• Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan		
	■ Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton)	22,4	40-50
	■ Pengembangan Pelabuhan Perikanan	21 unit	24 unit
	■ Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha)	15,7	20

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan pencapaian sasaran pokok nasional dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

- a. **Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.** Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan.
- b. **Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdayasaing, dan berkelanjutan.** Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan.
- c. **Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.** Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. Pengarusutamaan Gender
- b. Pembangunan Kewilayahan
- c. Adaptasi Perubahan Iklim
- d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

1. Kebijakan Pokok

- a. **Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan,** dilaksanakan dengan strategi :

1) **Memberantas IUU Fishing**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran (c) Peneggelaman kapal asing ilegal, (d) Penguatan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*, (e) Penguatan kerjasama regional maupun internasional, (f) Penerapan *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS)* secara konsisten

2) **Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/*surveillance aircraft* dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM dan kelembagaan pengawasan, (c) Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP.

3) **Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/*gateway* di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut :

1) **Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b) Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll)

2) **Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI,

(b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan ikan nasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap Ikan (API), (f) Penebaran benih di laut (ikan/kepiting/lobster/dll), (g) Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran

3) **Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan sistem perizinan berbasis web (*on line*) dan penguatan basis data, (b) Peningkatan PNBP dari SDA Perikanan

4) **Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penataan ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di PUD, (c) Pengaturan budidaya karamba di PUD

5) **Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut, (c) Budidaya ikan air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, (e) Pakan mandiri dan obat ikan, (f) Penguatan prasarana dan sarana budidaya, (g) Pengembangan kawasan budidaya

6) **Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan Unit Pengolahan Ikan terapung, (b) Pengaturan pengangkutan ikan (*port to port dan fishing ground to port*), (c) Penyediaan sistem penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan prasarana pengangkutan ikan hidup multifungsi, (e) Penyediaan sarana prasarana angkutan garam.

7) **Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan**

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b) Standarisasi produk kelautan dan perikanan, (c) Diversifikasi produk kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan industri rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Promosi produk kelautan dan perikanan, (g) Penyiasatan pasar (*market intelligence*)

8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan green belt) dan lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perairan, (c) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati

9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, (b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil

c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Asuransi nelayan, (b) Fasilitasi bantuan pascaklik/bencana alam, (c) Penguatan sosial budaya masyarakat adat.

2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyiapan kelompok masyarakat terhadap akses permodalan usaha, (b) Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi, (c) Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan.

3) Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang KP.

4) Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan, (b) Pembangunan *technopark*, (c) Peningkatan kualitas peserta didik (tata penyelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi), (d) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur), (e) Pengembangan sistem penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, dan ketenagaan).

5). Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD, rekayasa teknologi dan genetika induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan, dll), (b) Litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan, bioteknologi, dan garam), (c) Litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan, (d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan ruang laut, dll), (e) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan, (f) Peningkatan Knowledge Base Management System.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni (a) Pengarusutamaan Gender (PUG); (b) Pembangunan Kewilayahan; (c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan (d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan akan dilaksanakan dengan strategi **meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP**. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (c) Penyiapan *roadmap* PUG, (d) penyusunan data terpilah, (e) Pengembangan statistik gender, (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah.

b. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi **mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah**. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, (b) Penyiapan Rencana tata ruang wilayah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (c) Sinergi kegiatan di kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat

berbasis pulau-pulau kecil, (d) Peningkatan investasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta pada kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (e) Deregulasi (*debottlenecking*) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi, (f) Sinergi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (g) Sinergi kegiatan lintas sektor.

c. Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi :

- 1). **Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.** Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui : (a) Rehabilitasi kawasan pesisir, (b) Pelaksanaan kegiatan budidaya, penangkapan dan pengolahan-pemasaran yang ramah lingkungan, (c) Pengelolaan kesehatan ikan, (d) Peningkatan kapasitas laboratorium Hama dan Penyakit Ikan (HPI), (e) Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan spesies ikan tahan terhadap perubahan lingkungan.
- 2). **Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Perubahan Iklim** Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain: (a) Sistem informasi Nelayan Pintar, (b) Pengembangan sistem rantai dingin dari kapal (penangkapan dan penanganan hasil tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan, (c) Pengembangan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan sistem adaptasi dan mitigasi bencana serta penanggulangan pencemaran laut, (d) Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan diatas, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah :

- 1) **Membangun budaya kerja yang profesional**, langkah yang akan ditempuh adalah: (a) Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur; (b) Pengembangan manajemen pengetahuan; (c) Penyediaan data statistik dan informasi yang handal; (d) Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur; (e) Penyiapan peraturan perundangan yang harmonis; (f) Pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel; (g) Pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada pelayanan prima; (h) Peningkatan PNPB fungsional; (i) Kerjasama Internasional dan antarlembaga
- 2) **Meningkatkan kualitas pengawasan internal**, langkah

yang akan ditempuh meliputi: (a) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (b) Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis; (c) Peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

3. Program Pembangunan

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni :

1. Program Pengelolaan Ruang Laut
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

4. Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam **Quick Wins** dan **Program Lanjutan Lainnya**, yang ditugaskan kepada setiap K/L. *Quick wins* merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:

- a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat
- b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
- c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
- d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
- e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat

- f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
- g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM

Disamping quickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:

- a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan *Best Aquaculture Practices*.
- b. Pemberantasan *IUU fishing*.
- c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi :

1. **Rancangan Undang-Undang (RUU)**, yakni (a) RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), (b) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (c) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, (d) RUU tentang Zona Tambahan Indonesia, (e) RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, (f) RUU tentang Pendanaan Suprastruktur Usaha Perikanan, (g) Revisi UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia terkait pasal 24 ayat 3 mengenai pembentukan Bakorkamla, dan (h) Perbaikan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terkait dengan beberapa indikator yang belum terpenuhi (pembatasan keikutsertaan asing, pembatasan kepemilikan, kewajiban penghitungan dampak negatif dalam pemanfaatan SDA-LH, keterlibatan masyarakat adat, perempuan dan kaum marginal, mekanisme penyelesaian konflik adat, mekanisme penyelesaian masalah masa lalu, dan penindakan perlakuan diskriminatif).
2. **Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)**, yakni (a) RPP tentang Kapal Perikanan, (b) RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, (c) RPP tentang Pembudidayaan Ikan, (d) RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan

Nilai Tambah Hasil Perikanan, (e) RPP tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara, (f) RPP tentang Pengawasan Perikanan, (g) RPP tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (h) RPP tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan, (i) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut Nasional, (j) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut, (k) RPP tentang Izin Lokasi di laut yang Berada di Wilayah Perairan dan Wilayah perairan yuridiksi, (l) RPP tentang Kriteria, persyaratan dan mekanisme pendirian, dan/atau penempatan bangunan di laut, (m) RPP tentang Budaya Bahari, (n) RPP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim, (o) RPP tentang Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif, (p) RPP tentang Pendirian Bangunan Laut, (q) RPP tentang Pusat Fasilitas Kelautan, (r) RPP tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, (s) RPP tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan, (t) RPP tentang Gasetir Pulau, (u) RPP tentang Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil, dan (v) Revisi PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

3. **Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) dan Rancangan Keputusan Presiden (R. Keppres)**, yakni (a) R. Perpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, (b) R. Perpres tentang Komite Nasional *Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF)*, (c) R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, (d) R. Perpres tentang Penyelenggaraan Litbang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (e) R. Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, (f) R. Perpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (g) R. Perpres tentang Rencana Zonasi Laut, Selat dan Teluk, (h) R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, dan (i) R. Perpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

Secara terinci kerangka regulasi sebagaimana Lampiran II.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

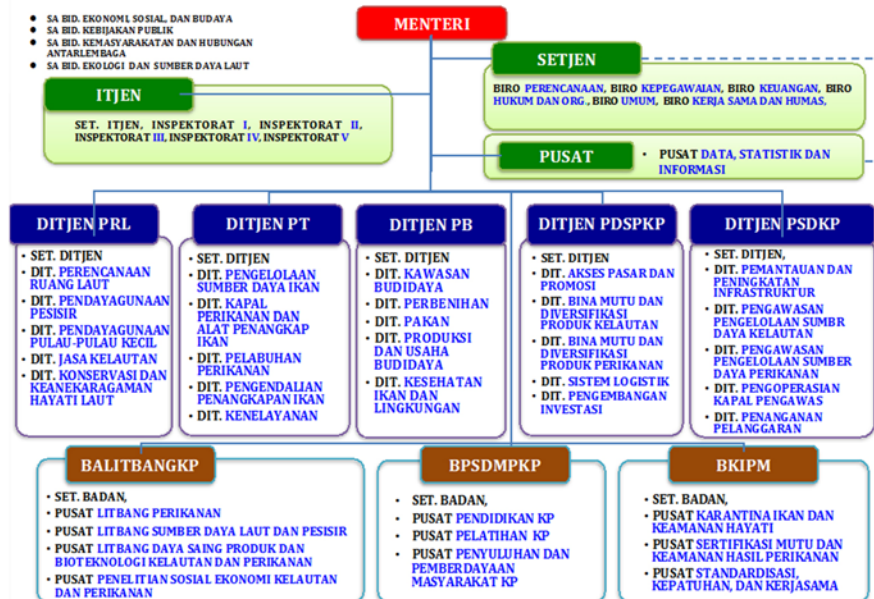
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

A. TARGET KINERJA

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	40,5	42	45	47,5	51
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,00	8,00	9,50	11,00	12,00
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP						
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	70	73	76	81	87
4	Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri	5	10	15	25	31
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan						
5	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	0,20	0,29	0,39	0,57	0,65
6	Nilai peningkatan ekonomi KP	0,59	0,69	0,79	0,90	1,00
7	Produksi perikanan (juta ton)	24,12	26,04	30,29	32,93	39,97
8	Produksi garam rakyat (juta ton)	3,3	3,6	3,8	4,1	4,5
9	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,86	6,82	7,62	8,53	9,54
10	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	40,9	43,88	47,12	50,65	54,49
11	Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP (%)	5	5,75	10	12,5	15

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif						
12	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6	6,5	7	7,5	8
SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan						
13	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)	70	76	82	89	95
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif						
14	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)	56,6	65,9	71,2	81,36	83,3
15	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	70	73	76	81	87
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian						
16	Indeks kompetensi dan integritas	65	77	75	80	85
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses						
17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40	50	60	70	100
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
18	Nilai Reformasi Birokrasi KKP	BB	BB	A	A	AA
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel						
19	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
20	Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator

kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran III.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana Lampiran III.

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN KKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran III.

Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2109, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PERMEN-KP/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMEN-KP/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

**KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2015-2019**

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)	Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur kewenangan daerah di laut.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kemenkumham • Kementerian LH dan Kehutanan • Kementerian PU • Kementerian Agraria dan Tata Ruang 	2016
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Mengakomodir perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum di bidang perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • DJPT • DJPB • DJ PSDKP 	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kemenkumham 	2016
3.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Mengakomodir tantangan yang dihadapi nelayan dalam peningkatan kehidupan seperti: <ol style="list-style-type: none"> Minimnya pendapatan dan modal kerja Minimnya prasarana dan sarana nelayan Kurangnya perlindungan Hak Nelayan Keterbatasan Akses Pasar 	DJPT	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kemenkumham • Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 	2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
4.	RUU tentang Zona Tambahan	Sampai saat ini belum ada pengaturan di Zona Tambahan. Padahal Zona Tambahan penting bagi Indonesia untuk melakukan pencegahan dan penindakan (pengejaran seketika (<i>hot pursuit</i>) yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang <i>fiscal</i> , kepabeanan, keimigrasian, kesehatan, dan perluasan pelangaran dibidang narkoba, <i>trafficking</i> , terorisme pengangkutan benda purbakala dan lain sebagainya	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kemenkumham • Kementerian Maritim 	2015
5.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	Mengakomodir kebutuhan hukum terkait dengan pengelolaan landas Kontinen Indonesia serta sevaga revisi/pengganti UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kemenkumham • Kemenlu 	2016
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidaya Ikan	Tindak lanjut Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Th. 2009	DJPB	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Setneg 	2015
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> • DJ PDS • BKIPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Setneg 	2015
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kapal Perikanan.	Tindak lanjut Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	DJPT	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kementerian Hukum dan HAM • Kemen Perhubungan 	2015
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.	Tindak lanjut Pasal 64 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	DJPB	Kementerian Hukum dan HAM	2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan.	Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> • Menko Polhukam • Setneg • Kementerian Hukum dan HAM 	2015
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Keayaan Negara	Tindak lanjut Pasal 76 C ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009	SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> • Setneg • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian Keuangan 	2015
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sanksi Administratif Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tindak lanjut Pasal 22C dan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Th 2014	<ul style="list-style-type: none"> • DJPRL • DJPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian PU • Kementerian ESDM • Kementerian Agraria dan Tata Ruang • Kementerian LH dan Kehutanan • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian Keuangan • Kemandagri • Setneg 	2015
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Kelautan	Tindak lanjut Pasal 13 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Kemenko Maritim • Setneg • Bappenas • Kementerian Keuangan 	2015
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Ruang Laut	Tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Kemandagri • Kemenko Maritim 	2015
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Laut	Tindak lanjut Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Kemandagri • Kemenko Maritim 	2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
16.	R. Perpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Tindak lanjut Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU • Kementerian Pariwisata • Kementerian ESDM • Kementerian Keuangan • Bappenas • Kementerian Hukum dan HAM, • Setneg • Bada Pusat Statistik 	2015
17.	R. Perpres tentang Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF)	Implementasi <i>The Agreement of The Establishment of The Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia</i> (CTI-CFF)	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Maritim • Kementerian Keuangan • Kementerian Luar Negeri • Bappenas • Kementerian Pariwisata 	2016
18.	R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	Tindak Lanjut Pasal 26A UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU • Kementerian Pariwisata • Kementerian ESDM • Kementerian Keuangan • Bappenas • Kementerian Hukum dan HAM, • Setneg • Kementerian BUMN • Kementerian Tenaga Kerja • Badan Koordinasi Penanaman Modal • Badan Informasi Geospasial 	2015
19.	R. Perpres tentang Penyelenggaraan Libang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tindak Lanjut Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL BALITBANG KP	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Maritim • Kementerian Keuangan • Kementerian Luar Negeri • Bappenas • LPI 	2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
20.	R. Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional	Perpres Mandiri	SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemenko Maritim • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Bappenas • Penda Maluku 	2015
21.	R. Perpres tentang Sempadan Pantai	Tindak Lanjut Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014	DJ PRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian LH dan Kehutanan • Kementerian Agraria dan Tata Ruang • Kemendagri 	2015
22.	R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> (IUU Fishing)	Sebagai mandat dari <i>Regional Plan of Action (RPOA) IUU Fishing</i>	DJPT	<ul style="list-style-type: none"> • Menko Polhukam • Menko Maritim • Kementerian Pertahanan • TNI AL • POLRI • BAKAMLA • Kementerian Hukum dan HAM • Sekretariat Negara • Bappenas 	2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			10.597,82	13.801,19	16.914,28	19.495,40	22.703,40	83.512,09						
		Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	40,5	42	45	47,5	51							
		Terwujudnya keadilan dalam pengelolaan SDKP	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,00	8,00	9,50	11,00	12,00							
			Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	70	73	76	81	87							
			Jumlah Pulau-pulau kecil yang mandiri	5	10	15	25	31							
		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	0,20	0,29	0,39	0,57	0,65							
			Nilai peningkatan ekonomi KP	0,59	0,69	0,79	0,90	1,00							
			Produksi perikanan (juta ton)	24,12	26,04	30,29	32,93	39,97							
			Produksi Garam Rakyat (juta ton)	3,3	3,6	3,8	4,1	4,5							
			Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,86	6,82	7,62	8,53	9,54							
			Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	40,9	43,88	47,12	50,65	54,49							
			Persentase peningkatan PNBp dari sektor KP (%)	5	7,5	10	12,5	15							
		Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6	6,5	7	7,5	8							
		Terselenggaranya tata kelola pemerintahan SDKP yang adil, bermartabat dan berkelanjutan	Efektivitas tata kelola pemerintahan SDKP yang adil, bermartabat dan berkelanjutan	70%	76%	82%	89%	95%							
		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel (dan tepat waktu) (%)	56,6%	65,9%	71,2%	81,36%	83,36%							
			Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	70%	73%	76%	81%	87%							

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
032	01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KKP		398,95	442,56	650,00	700,00	750,00	3.123,01						
		Tersedianya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	88	89	92	93	94							
		Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%							
		Tersedianya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	BB	BB	A	A	AA							
		Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)							
			Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
		Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6	6,5	7	7,5	8							
		Tersedianya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	88	89	92	93	94							
		Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%							
		Tersedianya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Indeks RB KKP	BB	BB	A	A	AA							
		Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)							
			Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
032	01	2532	Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	10,38	12,13	15,00	20,00	25,00	81,51						
		Tersedianya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Indeks RB KKP	BB	BB	A	A	AA							
		Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6	6,5	7	7,5	8							
		Tersedianya naskah kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga yang efektif	Persentase penyelesaian naskah kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga yang efektif	82	85	87	90	91							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
032	01	2323	Pengelolaan Kepegawaian KKP Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	88	89	92	93	94	15,78	17,10	18,12	20,05	22,11	93,16
				Presentase Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan disiplin pegawai sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
				Presentase Pelayanan Pengangkatan, Keangkatan, Pemberhentian, Penstun dan mutasi pegawai lainnya yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
				Presentase Pelayanan Administrasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
				Presentase penyelesaian dokumen penatausahaan Biro Kepegawaian yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
032	01	2324	Pengelolaan Keuangan KKP Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Tingkat ketepatan terhadap SAP (%)	100	100	100	100	100	16,13	19,78	20,00	22,00	25,00	102,78
				Tingkat kepatuhan terhadap SPI (%)	100	100	100	100	100						
				Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP	cukup	cukup	cukup	cukup	cukup						
				Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
				Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan BMN lingkup KKP sesuai SOP (%)	65	70	75	80	85						
032	01	2325	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai SAKIP KKP	A	A	A	AA	AA	34,23	44,07	47,21	50,14	52,04	227,69
				Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	40%	50%	60%	70%	100%						
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akurat	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)						
				Terselenggaranya koordinasi perencanaan, penganggaran, dan money serta pelaporan pembangunan KP	3	3	3	3	3						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
032	01	2326	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP Tersedianya prasarana kantor pusat KKP yang memadai	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor (%)	70	75	80	85	90	254,05	259,20	265,67	285,81	305,85	1.370,58
				Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP sesuai SOP (%)	82	85	87	90	92						
				Tewujudnya pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan KKP yang optimal	85	87	89	91	93						
				Persentase pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%)	85	87	89	91	93						
				Persentase pencapaian standar pelayanan administrasi persuratan dan kearsipan KKP serta ketatausahaan Biro sesuai SOP (%)	65	70	75	80	85						
				Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan BMN Sejalan yang optimal	100	100	100	100	100						
				Terselenggaranya layanan pengadaan dan perizinan terpadu											
				Terpenuhiya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	100	100	100	100	100						
032	01	2327	Perumusan Kebijakan Kelautan Tersedianya rumusan kebijakan pembangunan kelautan nasional	Jumlah dokumen rumusan kebijakan (dokumen)	1	1	1	1	1	15,84	14,67	17,00	18,00	20,00	85,51
032	01	2328	Pengelolaan Kerjasama KP dan Hubungan Masyarakat Terwujudnya kerja sama internasional dan antarbaga yang implementatif	Rasio jumlah pemberian yang negatif dibanding total pemberian sektor KP (%)	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%	17,38	22,00	35,00	40,00	46,00	159,38
032	01	2329	Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP Tersedianya data statistik dan informasi KP yang valid, handal dan mudah diakses	Persentase partisipasi aktif unit eselon I lingkup KKP dalam menggunakan layanan SIDATIK (%)	100	100	100	100	100	29,03	23,60	25,00	35,00	46,00	157,63

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
032	01	5281	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Indeks pemanfaatan informasi KP berbasis IT (%)	> 75%	> 75%	> 80%	> 80%	> 85%	6,10	30,00	207,00	209,00	210,00	662,10	
				Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%							
				Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai PUSDATIN (%)	100	100	100	100	100							
032	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KKP	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektorat I yang Berbasis Risiko	Persentase pemenuhan layanan perkantoran PUSDATIN (%)	100	100	100	100	100							
				Persentase modal usaha yang tersalurkan (%)	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%	73,21	98,97	140,97	146,48	151,60	611,23	
				Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							
032	03	2331	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP	Nilai <i>Integrity Assessment</i> KKP	8	8,25	8,5	8,75	9							
				Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP	A	A	A	AA	AA							
				Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP	BB	A	A	A	AA							
032	03	2332	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (Kumulatif)	4	6	8	10	12							
				Level Kapabilitas Ijin (ACM)	2	3	3	4	4							
				Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat I	100	100	100	100	100	5,59	9,72	10,22	10,63	11,06	47,22	
032	03	2332	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							
				Terselenggaranya Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektorat I dan KKP yang Efektif dan Efisien												
				Persentase pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat II	100	100	100	100	100							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
032	03	2332	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I	82	82,5	83	83,5	84							
				Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I	82	82,5	83	83,5	84							
				Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat I (per tahun)	3	6	7	8	9							
032	03	2332	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada Mitra Inspektorat I (%)	30	60	65	70	75							
				Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal pada Mitra Inspektorat I yang Efektif	81	82	83	84	85							
				Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I	81	82	83	84	85							
032	03	2332	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	Persentase tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat I (%)	95	95	95	95	95	5,80	10,38	42,03	43,71	44,73	176,67	
				Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektorat II yang Berbasis Risiko	100	100	100	100	100							
				Nilai Integritas Pelayanan Publik KKP	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00							
032	03	2332	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	82,25	82,5	83	83,5	84							
				Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II	82,25	82,5	83	83,5	84							
				Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat II (per tahun)	2	8	83	83,5	84							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
032	03	2333	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektoral III dan Pelaksanaan Pembangunan KP	Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada Mitra Inspektoral II (%)	30	60	9	10	11	5,58	10,00	10,28	10,69	11,11	47,54
				Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektoral II	81	82	83	85	87						
				Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektoral II	81	82	83	84	85						
				Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja Inspektoral II	95	95	95	95	95						
				Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektoral III yang Berbasis Risiko	100	100	100	100	100						
				Terselenggaranya Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektoral III dan KKP yang Efektif dan Efisien	A	A	A	AA	AA						
				Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektoral III	82,25	82,5	83	83,5	84						
				Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektoral III	82,25	82,5	83	83,5	84						
				Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektoral III (per tahun)	2	8	9	10	11						
				Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada Mitra Inspektoral III (%)	30	60	65	70	75						
				Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal pada Mitra Inspektoral III yang Efektif											

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
032	03	2334	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektoral IV dan Pelaksanaan Pembangunan KP	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektoral III	81	82	83	85	87	5,48	8,81	10,25	10,66	11,09	47,35
				Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Pulau-pulau Kecil terpadu (P2KT) lingkup Inspektoral III	81	82	83	84	85						
				Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja Inspektoral III	95	95	95	95	95						
				Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektoral IV yang Berbasis Risiko	100	100	100	100	100						
				Terselenggaranya Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektoral IV dan KKP yang Efektif dan Efisien	BB	A	A	A	AA						
				Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektoral IV	82,25	82,5	83	83,5	84						
				Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektoral IV	82,25	82,5	83	83,5	84						
				Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektoral IV (per tahun)	2	8	9	10	11						
				Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada Mitra Inspektoral IV (%)	30	60	65	70	75						
				Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal pada Mitra Inspektoral IV yang Efektif	81	82	83	85	87						
				Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektoral IV	81	82	83	84	85						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
032	03	2335	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektora IV sesuai Kebutuhan	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja Inspektora IV	95	95	95	95	95									
032	03	2335	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektora V dan Pelaksana Pembangunan KP	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja Inspektora IV	95	95	95	95	95									
			Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Lingkup Mitra Inspektora V yang Berbasis Risiko	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektora V	100	100	100	100	100									
			Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektora V dan KKP yang Efektif dan Efisien	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektora V	82,25	82,5	83	83,5	84									
				Persentase jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP	82	82,5	83	83,5	84									
				Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (Kumulatif)		6	8	10	12									
				Jumlah Unit Kerja yang dipersiapkan menjadi WBK	8	10	16	22	28									
				Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektora V	82,25	82,5	83	83,5	84									
				Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektora V (per tahun)	1	2	2	2	2									
				Persentase Cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas lingkup KKP (%)	30	60	65	70	75									
			Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal pada Mitra Inspektora V yang Efektif	Persentase pelaksanaan penguasaan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektora V	81	82	83	85	87									
				Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektora V	81	82	83	84	85									

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
032	03	2336	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ijen Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja Inspektora V	95	95	95	95	95									
			Tersedianya ASN KKP yang kompeten dan profesional	Indeks kompetensi dan integritas	65	75	77	80	85									
				Persentase pegawai Ijen yang memenuhi standar diklat (%)	55	60	70	80	90									
			Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Ijen	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ijen (%)	40	50	60	70	100									
				Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Ijen (%)	55	60	70	80	90									
				Nilai Penerapan RB Ijen	BB	BB	A	A	AA									
				Nilai SAKIP Ijen	A	A	A	A	AA									
				Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Ijen	4,25	4,35	4,45	4,55	4,60									
				Level Kapabilitas Ijen (IACM)	2	3	3	4	4									
			Terkeblanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai efisiensi anggaran Ijen (%)	>95	>95	>95	>95	>95									
				Tingkat Kewajaran Pengungkapan LK Ijen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP									
			Terperuhnya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Ijen (%)	100	100	100	100	100									
				Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ijen (%)	100	100	100	100	100									
032	04		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							762,22	888,93	1.438,50	1.500,00	1.550,00	6.139,66			
			Tervujudnya pengelolaan SDP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang ditetapkan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan	11 WPP 5 KPP PUD	11 WPP 6 KPP PUD	11 WPP 6 KPP PUD	11 WPP 7 KPP PUD	11 WPP 7 KPP PUD									

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILLIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILLIAR)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
03	04	2388	Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan yang Diusulkan untuk Diadopsi	36	45	60	75	90									
			Meningkatnya Hasil Penyelidikan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang Mendukung Kesejahteraan Masyarakat KP	Jumlah Inovasi Kelautan dan Perikanan yang Diadopsi	59	75	90	100	110									
			Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Jumlah Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan yang direkomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri	50	76	104	119	143									
03	04	2389	Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	10	13	10	10	10									
			Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang Diterbitkan	65	65	65	65	65									
			Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	PL: Jumlah Rekomendasi Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	5	6	6	6	6									
			Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	Jumlah Bahan Usulan HKI Daya Saing dan Bioteknologi KP	1	1	1	1	1									
			Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	Jumlah Komponen Inovasi Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	8	8	7	8	8									
			Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	Jumlah Inovasi Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	8	12	18	20	25									
			Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	1	1	1									
			Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP	Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Daya Saing dan Bioteknologi KP	1	1	1	1	1									

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILLIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILLIAR)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
03	04	2370	Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan KP Berkelanjutan	15	11	13	13	16									
			Tersedianya Rekomendasi dan analisis Kebijakan KP berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Sosial Ekonomi KP	Jumlah Rekomendasi Sosial Ekonomi KP	-	6	7	9	9									
			Tersedianya Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	Jumlah Data dan/atau Informasi Sosial Ekonomi KP	2	10	15	19	24									
			Tersedianya Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan KP	30	30	30	30	30									
			Tersedianya Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP	4	8	10	15	8									
			Tersedianya Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	PL: Jumlah Sarana Prasarana Litbang Sosial Ekonomi KP yang Terasiliasi	1	1	1	1	1									
			Tersedianya Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	Jumlah Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Sosial Ekonomi KP	1	1	1	1	1									
03	04	2370	Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan	Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Litbang Perikanan	20	21	21	21	22									
			Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Perikanan yang Implementatif Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPP) Laut yang Teridentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikaninya	11	11	11	11	11									
			Tersedianya Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Dataran (KPP PUD) yang Teridentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikaninya	8	8	8	8	8									
			Tersedianya Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	Jumlah Konservasi Habitat dan/atau Sumberdaya Ikan	5	5	5	5	5									
			Tersedianya Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	Jumlah Data dan Informasi Litbang Perikanan	41	41	41	41	41									
			Tersedianya Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP	Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan	320	332	320	320	320									

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Perikanan	Jumlah Bahan Usulan HKI Perikanan	3	3	3	3	3							
			Jumlah Inovasi Teknologi Perikanan	85	76	75	75	74							
			Jumlah Komponen Inovasi Perikanan	32	32	32	32	32							
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	11	11	11	11							
			Jumlah Dukungan Teknis Litbang Perikanan	11	11	11	11	11							
03	04	2372	Penelitian dan Pengembangan Iptek Instrumentasi Kelautan dan Perikanan												
		Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Instrumentasi KP	Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan	3	4	13	13	13							
			Jumlah Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan	1	3	3	4	4							
			Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan	32	32	32	32	32							
		Tersedianya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Instrumentasi KP	Jumlah Bahan Usulan HKI Instrumentasi KP	0	1	2	3	4							
			Jumlah Inovasi Teknologi Instrumentasi KP	7	6	6	6	6							
			Jumlah Komponen Inovasi Instrumentasi KP	4	4	4	4	4							
		Tersedianya Sistem Informasi di Sentra Nelayan Hasil Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP	OW, Jumlah Sentra Nelayan yang Terbangun Sistem Informasi Nelayan	20	30	15	15	10							
		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Instrumentasi KP	Jumlah Prasarana/Infrastruktur Instrumentasi KP	1	1	0	0	0							
			Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Instrumentasi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	5	5	5	5							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Instrumentasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Instrumentasi Kelautan dan Perikanan	1	1	1	1	1							
03	04	2373	Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir												
		Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Terkait Pengelolaan dan Pemantauan Sumberdaya Laut dan Pesisir Secara Berkelanjutan	18	10	15	18	20							
			Jumlah Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya	5	5	5	5	5							
			Jumlah WPP yang Terpetakan Karakteristik dan Dinamika Laut	5	5	5	5	5							
			Jumlah Data dan/atau Informasi Sumberdaya dan Laut dan Pesisir	5	8	8	8	8							
			Karya Tulis Ilmiah Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir	45	45	45	45	45							
		Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir yang Inovatif	Jumlah Inovasi Teknologi Sumberdaya Laut dan Pesisir	10	15	20	25	30							
			Jumlah Komponen Inovasi Sumberdaya Laut dan Pesisir	5	8	10	13	15							
			Jumlah Bahan Usulan HKI Sumberdaya Laut dan Pesisir	1	1	1	1	1							
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	Jumlah Sarana Prasarana Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir	2	2	2	2	2							
			Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir	2	2	3	4	4							
03	04		Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP												
		Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pengelolaan Inovasi dan alih teknologi KP yang Implementatif	Rekomendasi Kebijakan Penerapan dan Alih Teknologi	0	7	7	7	7							
		Terwujudnya Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP	Jumlah Teknologi yang direkomendasikan	0	10	10	10	10							
			Jumlah Adopsi dan/atau kerjasama Iptek	59	75	90	100	110							

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
			Jumlah Usulan HKI KP ke Lembaga Paten Nasional	3	6	10	12	15							
			Jumlah Teknologi yang Dikomersilkan	0	1	1	2	2							
			Jumlah Penyebaran Teknologi KP	6	12	24	34	34							
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Libang dan Layanan/Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP	Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	3	1	1	1							
			Jumlah Dukungan Teknis Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP	0	1	1	1	1							
03	04	Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan							21,73	18,48	37,16	48,71	49,80	175,87	
		Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan yang Terpetakan Sumberdaya Lahannya	0	4	6	8	10							
			Jumlah Data dan Informasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	2	2	2	3	5							
			Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	15	15	15	15	15							
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Libang dan Layanan Iptek Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Libang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	1	1	1							
			Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Libang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan	1	1	1	1	1							
03	04	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan							348,44	229,87	399,29	502,26	529,03	2.009,90	
		Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup Balitbang KP	65	75	77	80	85							
		Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%							

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang KP	BB	BB	A	A	AA								
		Terkeluarnya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balitbang KP	Baik (80-90)	>95%	>95%	>95%	>95%								
		Terpenyuhnya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Presentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Pusat Balitbang KP (%)	100	100	100	100	100								
			Presentase pemenuhan layanan Sekretariat perkantoran (%)	100	100	100	100	100								
032	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN							906,39	1.446,68	1.750,00	2.000,00	2.500,00	8.603,07		
		SDM KP memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	Presentase lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan terhadap lulusan pendidikan KP	95%	95%	95%	95%	95%								
			Presentase anak pelaku utama yang diterima di satuan pendidikan kp terhadap peserta didik baru	40%	44%	46%	48%	50%								
			Presentase lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap yang dilatih	90%	90%	90%	90%	90%								
		Masyarakat KP yang memiliki kemandirian	Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok)	4.500	6.400	7.400	8.500	9.700								
			Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat usahanya dari skala mikro ke skala kecil, skala kecil menjadi skala menengah (orang)	4.500	10.000	15.000	20.000	25.000								
032	05	Pelatihan Kelautan dan Perikanan							214,12	359,10	422,57	482,94	619,63	2.096,36		
		Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	23.000	35.000	40.000	45.000	50.000								
			Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	2.200	8.000	8.000	8.500	9.000								
			Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih bersertifikat kompetensi (orang)	19550	29.750	34.000	35.700	42.500								

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
032	05	2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Tersedianya lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di bidang KP	406	431	456	481	481										
				Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar (unit)				481	481										
				Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Kerja KP (buah)	8	14	20	6	6										
				Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (unit)	25	25	25	-	-										
				Jumlah taman teknologi KP (unit)	4	8	15	24	24										
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	100%	100%	100%	100%	100%										
				Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pelatihan KP	100%	100%	100%	100%	100%										
				Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai UPT Pelatihan KP (%)	100%	100%	100%	100%	100%										
032	05	2377	Peningkatan Kapasitas Masyarakat KP dalam mendapatkan akses pendidikan	Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)	6.325	6.725	6.950	7.250	7.325										
				Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang)	110	110	110	110	110										
				Jumlah satuan pendidikan KP yang terakreditasi sesuai standar (unit)	13	13	14	17	17										
				Jumlah warga belajar yang mendapatkan akses pendidikan vokasi non formal KP	500	500	500	500	500										
				Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	100%	100%	100%	100%	100%										
				Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pendidikan KP	100%	100%	100%	100%	100%										
				Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai UPT Pendidikan KP (%)	100%	100%	100%	100%	100%										
32	5	2377	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah kelompok pelaku usaha yang disuluh (kelompok)	52.770	60.000	70.000	80.000	90.000										
				Jumlah petugas yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang)	12.000	16.300	16.300	16.500	16.500										
				Penerapan inovasi teknologi melalui percontohan penyuluhan (unit)	20	68	68	68	68										
				Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang)	500	2.000	2.500	2.500	2.500										
				Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan	1.500	2.250	2.500	2.750	3.000										
				Jumlah pendamping KP yang meningkatkan daya saingnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendukung peningkatan produksi usaha perikanan (orang)	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000										
				Persentase dokumen penatausahaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP	100%	100%	100%	100%	100%										
32	5	2378	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup BPSDMKP	65	77	75	80	85										
				Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%										
				Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BPSDMKP	BB	BB	A	A	AA										
				Nilai kinerja anggaran BPSDMKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)										
				Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Pusat BPSDM KP (%)	100	100	100	100	100										
				Persentase pemenuhan layanan Sekretariat perkantoran (%)	100	100	100	100	100										
032	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Pertumbuhan PDB Perikanan	7,00	8,00	9,50	11,00	12,00										
				Nilai Tukar Neleayan (NTN)	105	105	106	106	107										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
32	5	2378	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup BPSDMKP	65	77	75	80	85									
				Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40%	50%	60%	70%	100%									
				Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BPSDMKP	BB	BB	A	A	AA									
				Nilai kinerja anggaran BPSDMKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)									
				Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Pusat BPSDM KP (%)	100	100	100	100	100									
				Persentase pemenuhan layanan Sekretariat perkantoran (%)	100	100	100	100	100									
032	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Pertumbuhan PDB Perikanan	7,00	8,00	9,50	11,00	12,00									
				Nilai Tukar Neleayan (NTN)	105	105	106	106	107									

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)						
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
			Rata-Rata pendapatan:																	
			a. Pendapatan RTP/bulan (Rp/RTP/bulan)	5.145.860	5.485.100	5.823.570	6.047.320	6.250.500												
			b. Pendapatan Nelayan/bulan (Rp/nelayan/bulan)	1.933.640	2.068.200	2.198.500	2.290.920	2.374.200												
			Jumlah produksi perikanan tangkap																	
			a. Volume produksi (ton)	6.299.290	6.451.330	6.634.220	6.808.300	6.982.560												
			b. Nilai Produksi (Rp Juta)	115.910.940	125.174.890	134.830.020	142.006.940	148.880.790												
			Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp Triliun)	20,00	23,00	25,00	28,00	31,00												
			Jumlah penyerahan akses pemodalan perikanan tangkap (Rp Miliar)	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00												
			Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP)	2,00	5,00	7,00	9,00	11,00												
002	06	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan											491,70	2.617,96	736,25	539,90	441,99	4.549,19	
			Tujujuhnya kapal perikanan Indonesia, alat penangkap ikan dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP	700	1200	1500	1800	1900												
			Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan (unit)		3150	3300	3500	3600												
			Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan sertifikasi dari inovasi alat penangkap standar dan sertifikasi dari inovasi kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang dihasilkan (buah)	23	25	26	28	30												
			Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit)	18000	20000	22500	25000	27000												
			Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)	700	1200	1700	1900	2000												
			Jumlah kapal yang menerapkan cara penangkapan ikan yang baik di atas kapal (unit)	200	400	600	800	1000												
			Jumlah operasional kapal yang dihitung produktivitasnya (unit)		800	1200	1500	1800												

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)							
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
			Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saring	163	3.532	475	275	175													
			Jumlah kapal perikanan > 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit)	25	25	25	25	25													
			Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioptimalkan (unit)		16.675	5.250	4.000	3.350													
			Jumlah fasilitas konversi BBM ke B8G bagi kapal perikanan	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000													
			Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan (%)	100	100	100	100	100													
002	06	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan											1.285,70	95,73	660,00	720,00	745,00	3.433,35		
			Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan	102	110	120	130	150													
			Jumlah perubahan perikanan yang dilaksanakan kesyahbандaran (lokasi)	22	32	37	42	45													
			Jumlah perubahan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi)	22	30	50	70	90													
			Jumlah perubahan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan konstruksi (lokasi)		50	60	70	80													
			Jumlah identifikasi dan penyediaan pembangunan pelabuhan perikanan (termasuk fasilitas dan koordinasi pengembangan sentra perikanan terpadu) (lokasi)	55	34	34	34	34													
			Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar pelayanan ISO-9001 (lokasi)	34	5	10	15	22													
			Berkembangnya pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	3	-	5	5	5													
			Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan daerah prioritas (lokasi)	22	22	22	23	24													
			Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan / ecoport (lokasi)	3	-	4	4	4													

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
			Jumlah pengembangan sentra perikanan terpadu (lokasi)	30	-	20	20	20								
			Jumlah perubahan perikanan yang optimal menerapkan sistem informasi dan keterpaduan (lokasi)	22	120	135	150	165								
		Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pelabuhan Perikanan (%)	100	100	100	100	100								
032	06	2339	Pengendalian Penangkapan Ikan							39,42	68,83	61,57	73,69	86,23	331,84	
			Meningkatnya pelayanan prima dan ketelitian usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP													
			Jumlah alokasi izin yang diberikan terhadap peluang akses usaha penangkapan ikan yang tersedia (unit)	10.000	12.500	12.600	12.700	12.800								
			Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SUP (unit)	9.600	11.250	11.340	11.430	11.500								
			Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan (SIUP) (hari kerja /dokumen permohonan)	10	9	8	7	6								
			Waktu pelayanan izin kapal penangkap/ pengangkut ikan (SIP, SKP) (hari kerja/ dokumen permohonan)	7	6	5	4	3								
			Jumlah kapal penangkapan ikan yang memenuhi kepatuhan usaha (%)	100	100	100	100	100								
			Meningkatnya pengendalian penangkapan ikan rasional													
			Jumlah unit usaha penangkapan ikan yang terevaluasi (unit)	2	4	6	6	11								
			Jumlah penguatan dan integrasi sistem perizinan pusat-daerah (Prov/Kab/Kota)	11	15	20	25	34								
			Jumlah pengelolaan basis data dan informasi usaha penangkapan ikan pusat-daerah (Prov)	15	20	25	34									
			Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan (%)	100	100	100	100	100								
032	06	2340	Pengelolaan Kenyelayanan							437,45	294,13	774,66	966,33	1.210,41	3.672,57	
			Meningkatnya kapasitas kenyelayanan													
			Jumlah penguatan kelembagaan usaha nelayan (kelompok)	2.000	2050	2100	2150	2200								
			Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (lokasi)	34	34	34	34	34								

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
			Jumlah nelayan yang mampu mengelola usahanya (orang)	2.040	2080	3120	4160	5200							
			Jumlah diversifikasi usaha keluarga nelayan (Rumah Tangga Perikanan/RTP)	1.020	1040	2060	3080	4050							
			Jumlah pembinaan sistem informasi kenyelayanan (lokasi)	30	2	20	20	10							
			Meningkatnya akses informasi, kualitas lingkungan nelayan, dan perlindungan kenyelayanan												
			Jumlah kawasan sentra /kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi (lokasi)	100	100	200	200	200							
			Jumlah nelayan yang terfundungi (orang)	20.000	1.000.000	1.240.000	1.550.000	1.940.000							
			Jumlah fasilitas sertifikasi tanah nelayan (bidang tanah)	23.000.000	20.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000							
			Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Kenyelayanan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
032	06	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan							161,62	96,47	139,14	161,10	181,77	676,36
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan laut dan perairan pedalaman												
			Jumlah ekosistem perairan pedalaman yang direvitalisasi (lokasi)	3	6	9	12	15							
			Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)	5	7	9	10	11							
			Jumlah laut ZEE yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)	2	4	6	7	7							
			Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang diimplementasikan (buah)	3	3	3	3	3							
			Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP)	3	6	9	10	11							
			Jumlah inisiasi pengembangan kelembagaan pengelolaan WPP (wilayah)	1	2	3	3	4							
			Meningkatnya ketersediaan data, informasi dan statistik perikanan tangkap yang akurat untuk pengelolaan sumber daya ikan												
			Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	250	500	750	1.000	1.250							
			Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit)	500	150	200	250	300							
			Jumlah ketersediaan data dan statistik perikanan tangkap (dokumen)	7	7	7	7	7							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
032	06	2342	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	100	100	100	100	100	288,28	340,41	444,73	490,45	541,45	2.144,93
			Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	100	100	100	100	100						
			Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	100	100	100	100	100						
			Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	100	100	100	100	100						
032	07		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1.360,77	1.676,04	2.606,81	3.417,75	4.578,85	13.640,22
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya.	17,9	19,46	22,80	26,72	31,32						
			Produksi perikanan budidaya (Juta Ton)	17,9	19,46	22,80	26,72	31,32						
			- Ikan (juta ton)	7,3	8,35	9,41	10,55	11,78						
			- Rumpuk Laut (juta ton)	10,6	11,11	13,39	16,17	19,54						
			Ikan Hias (milyar ekor)	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50						
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Perikanan Budidaya	7	8,00	9,50	11,00	12,00						
			Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	8,00	9,50	11,00	12,00						
			Jumlah kredit program bidang perikanan budidaya yang disalurkan (Rp. Miliar)	135	325,00	575,00	925,00	1390,00						
			Jumlah investasi bidang perikanan budidaya (Rp. Miliar)	23500	24000	24500	25000	25500						
			Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTP)	102	102,25	102,50	102,75	103,00						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
032	07	2343	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan						107,66	68,33	105,60	126,72	152,06	560,37
			Tersedianya kebijakan pembangunan bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang implementatif	5	5	5	6	6						
			Tersedianya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang berdaya sang dan berkelanjutan	50	57	63	71	81						
			Tersedianya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang berdaya sang dan berkelanjutan	25,235	29,025	33,285	36,935	41,135						
			Jumlah hasil perkerjasama teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket teknologi; non kumulatif)	16	18	19	20	21						
			Jumlah paket desiminasi teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket; non kumulatif)	17	18	23	24	25						
			Terselenggaranya pendendalian budidaya bidang kesehatan ikan dan lingkungan secara efektif											
			Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dilakukan survalian dan atau monitoring (kab/kota; non kumulatif)	100	115	115	130	145						
			Jumlah kawasan budidaya yang mendapat perenangan kualitas lingkungannya (kawasan; non kumulatif)	35	100	115	130	145						
			Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya (obat; kumulatif)	250	272	284	296	308						
			Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 90% bebas residu (sampel; non kumulatif)	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600						
			Presentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di DIT. Keskanling (%)	100	100	100	100	100						
032	07	2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan						150,81	327,10	566,28	647,11	711,82	2.425,12
			Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan budidaya di bidang perbenihan yang implementatif	8	9	10	11	12						
			Jumlah RSMI 3 yang tersedia; (Judul, non kumulatif)	8	9	10	11	12						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
032		Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah produksi induk unggul di UPT/UPTD (juta ekor, non kumulatif) Jumlah unit pembenihan yang menggunakan induk unggul (unit, kumulatif) Jumlah unit pembenihan ikan air tawar siap sertifikasi; (unit, non kumulatif) Jumlah unit pembenihan ikan air payau siap sertifikasi; (unit, non kumulatif) Jumlah unit pembenihan ikan air laut siap sertifikasi; (unit, non kumulatif) Jumlah hasil perakayasan teknologi terapan bidang perbenihan (paket teknologi) Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang perbenihan (paket)	1	1,2	1,4	1,5	1000							
		Terselenggaranya sertifikasi unit pembenihan	Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik); (unit, kumulatif)	553	678	813	958	1108							
		Terdudnya sentra kebun bibit rumput laut	Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut; (kawasan, kumulatif)	22	300	305	310	315							
		Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan sistem perbenihan	Prosentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dit. Perbenihan (%)	100	100	100	100	100							
032	07	2345	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya						451,71	388,49	647,48	971,21	1.456,82	3.915,71	
		Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan budidaya di bidang kawasan yang implementatif	Jumlah perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya (Kab/kota; non kumulatif) Jumlah perencanaan detail dan/atau pembangunan kawasan perikanan budidaya (kawasan, non kumulatif) Jumlah RSM 3 bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disusun (judul; non kumulatif)	20	25	30	35	35							
				34	40	46	52								
				8	9	10	11	12							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang kawasan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah hasil perakayasan sub bidang pembangunan kawasan budidaya (paket teknologi; non kumulatif) Jumlah diseminasi sub bidang pembangunan kawasan budidaya (paket; non kumulatif) Jumlah kawasan budidaya yang prasarananya mampu operasional secara tepat guna (kawasan; non kumulatif) Jumlah kelompok partisipatif yang melakukan pemeliharaan infrastrukturnya secara efektif (kelompok; non kumulatif) Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/kota; kumulatif) Jumlah stakeholder utama yang terlibat mendukung kawasan minapolitan (stakeholder; kumulatif)	3	6	10	13	13							
		Tersedianya sarana di kawasan perikanan budidaya	Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya (kelompok; non kumulatif)	700	750	800	850								
		Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan sistem perbenihan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dit. Kawasan Budidaya (persen)	100	100	100	100	100							
032	07	Pengelolaan Pakan Ikan							-	132,83	247,92	297,50	357,00	1.014,95	
		Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan budidaya di bidang pengelolaan pakan yang implementatif	Jumlah RSM 3 bahan baku pakan dan pakan ikan (judul; kumulatif)	16	18	20	22								
		Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang pengelolaan pakan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah pelaku usaha substitusi bahan baku pakan lokal (unit usaha) Persentase penggunaan bahan baku lokal sebagai substitusi dalam kelompok pakan mandiri (persen) Jumlah jenis pakan ikan terdaftar (jenis; kumulatif)	5	10	20	40	20							
				5	10	15	20								
				1000	1100	1200	1300								

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp. MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. MILIAR)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
032	KEG	Terselenggaranya sertifikasi unit produsen pakan	Jumlah lokasi pakan mandiri (provinsi)	2015	20	25	30	34		2015						
				2016	200	250	300	350								
				2017	20	40	60	80								
				2018	18	18	18	18								
				2019	6	6	6	6								
				Kumulatif	5	20	30	40								
032	07	Pengelolaan Produk dan Usaha Budidaya Ikan	Kebijakan pembangunan bidang produksi perikanan budidaya yang implementatif	2015	6	7	8	9	10	2015	364,68	424,32	666,15	999,23	1.498,84	3.953,21
				2016	6	6	6	6	6							
				2017	14	14	14	18	18							
				2018	24	124	144	164	184							
				2019	9.200	10.980	13.780	16.760	20.200							
				Kumulatif	700	900	1100	1300								
032	07	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan pakan ikan	Tata kelola pemantauan sumberdaya bidang produksi perikanan budidaya yang mandiri dan berkelanjutan	2015	6	6	6	6	6	2015	666,15	424,32	666,15	999,23	1.498,84	
				2016	6	6	6	6	6							
				2017	14	14	14	18	18							
				2018	24	124	144	164	184							
				2019	9.200	10.980	13.780	16.760	20.200							
				Kumulatif	700	900	1100	1300								

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp. MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. MILIAR)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
032	KEG	Kemudahan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan	Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitas (Orang; non kumulatif)	2015		500	600	700	800	2015						
				2016		15000	17000	19000	21000							
				2017	650	700	750	800	850							
				2018	15	20	25	30								
				2019	100	100	100	100	100							
				Kumulatif	100	100	100	100	100							
032	07	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan produksi dan usaha	2015						2015	285,91	334,97	351,39	375,99	402,30	1.507,10
				2016												
				2017												
				2018												
				2019												
				Kumulatif												
032	KEG	Tersedianya ASN KKP yang kompeten dan profesional	Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional lingkup DJPB (%)	2015	<15%	<14%	<13%	<12%	<10%	2015						
				2016	100	100	100	100	100							
				2017	>75%	>80%	>80%	>80%	>85%							
				2018	BB	A	A	A	AA							
				2019	A	A	A	AA	AA							
				Kumulatif	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%							
032	KEG	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Indeks Pemertaaan Informasi DJPB Berbasis TI (%)	2015						2015						
				2016												
				2017												
				2018												
				2019												
				Kumulatif												
032	KEG	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi	Nilai Penerapan RB DJPB	2015	BB	A	A	A	AA	2015						
				2016	A	A	A	AA	AA							
				2017												
				2018												
				2019												
				Kumulatif	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%							
032	KEG	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai efisiensi anggaran DJPB	2015						2015						
				2016												
				2017												
				2018												
				2019												
				Kumulatif												
032	KEG	Terperuhnya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPB (%)	2015	100	100	100	100	100	2015						
				2016	100	100	100	100	100							
				2017	100	100	100	100	100							
				2018	100	100	100	100	100							
				2019	100	100	100	100	100							
				Kumulatif	100	100	100	100	100							

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
032 08	PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	<p>Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$ Miliar)</p> <p>Rata-rata Konsumsi Ikan per Kapita Nasional (Kg/Kap)</p> <p>Volume produk olahan hasil perikanan (Juta Ton)</p> <p>Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)</p> <p>Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp miliar)</p> <p>Meningkatnya daya saing produk dan logistik kelautan dan perikanan</p> <p>Meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan</p> <p>Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan</p>	6,82	7,62	8,63	8,63	9,54	1.008,87	1.814,67	2.500,00	3.000,00	3.500,00	11.823,54
032 08 2356	Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan		<p>Jumlah pelaku usaha logistik yang dibina (pelaku usaha)</p> <p>Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya (kelompok)</p> <p>Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN (lokasi)</p> <p>Profil lokasi logistik (lokasi)</p> <p>Presentase Nilai Impor terhadap Nilai Ekspor pada Tahun Berjalan dalam rangka pengendalian (%)</p> <p>Seisih harga ikan di tingkat produsen dan pasar grosir (%)</p> <p>Kerjasama antar pelaku usaha logistik hasil perikanan (pelaku usaha)</p> <p>Jumlah analisis kebutuhan infrastruktur di koridor logistik ikan nasional (lokasi)</p> <p>Pembinaan Pemanfaatan infrastruktur logistik di koridor logistik ikan nasional (lokasi)</p>	300	325	350	375	375	198,92	316,28	484,00	503,25	568,00	2.134,24

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
032 08 2357	Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	<p>Meningkatnya Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan</p> <p>Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Sistem Logistik</p>	<p>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Logistik (unit)</p> <p>Jumlah Gudang Beku (<i>cold storage</i>) yang tersedia di daerah sentra perikanan (unit)</p> <p>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Sistem Logistik (Dokumen)</p> <p>Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan</p>	20	40	50	60	60	35,57	386,69	482,00	652,50	778,50	2.333,92
				3	3	4	5	6						
				15	17,5	20	25	25						
				15	17,5	20	25	25						
				200	225	250	275	275						
				60	61	62	63	63						
				20	25	30	40	40						
				200	215	230	250	250						
				200	215	230	250	250						
				34	34	34	34	34						
				4500	4600	4750	5000	5000						
				35	35	35	35	35						
				35	35	35	35	35						
				5	5	5	5	5						
				1	1	1	1	1						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Akses Pasar dan Promosi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Akses Pasar dan Promosi (dokumen)	1	1	1	1	1								
032	08	Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan														
		Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan	Jumlah rancangan standar nasional Indonesia (RSNI) yang disusun (RSNI)		5	9	14	20								
			Jumlah standar nasional Indonesia (SNI) produk perikanan yang dievaluasi penerapannya (SNI)		10	12	15	20								
			Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (SKP)		790	825	900	1000								
			Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan (UPI)		1.000	1100	1250	1400								
			Utilitas UPI (%)		81	82	83	85								
			Jumlah Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam)		40	45	50	60								
			Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dianalisa dalam rangka memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk perikanan (Lokasi)		35	45	55	65								
			Jumlah Kerjasama Peleaku Usaha yang Terbentuk (kerjasama)		300	350	400	500								
			Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dimanfaatkan dalam rangka memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk perikanan (Lokasi)		25	30	35	40								
		Meningkatnya mutu produk olahan hasil perikanan di sentra perikanan terpadu	Lokasi pengembangan mutu pengolahan hasil perikanan di sentra perikanan terpadu (lokasi)		4	5	7	10								
		Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	Dukungan Manajemen Direktorat Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (Dokumen)		1	1	1	1								

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan	Jumlah UMKM Produk Kelautan yang dibina (UMKM)		200	840	890	940	1000							
			Jumlah Usaha Besar Produk Kelautan yang dibina (Usaha Besar)		30	50	60	70	80							
			Jumlah lokasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Produk Kelautan (Lokasi)		50	55	60	65	65							
			Jumlah lokasi pemanfaatan Sarana dan Prasarana Produk Kelautan (Lokasi)		40	50	55	60	60							
			Jumlah Rancangan standar nasional Indonesia yang disusun dalam Penguatan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, (RSNI)		5	5	5	5	5							
			Jumlah Standar Nasional Indonesia yang diterapkan dalam Penguatan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan,(SNI)		5	10	15	20	20							
			Nilai Produk Non Bioteknologi Kelautan (Rp. Triliun)		12,78	15,85	19,78	24,61								
			Jumlah lokasi pembinaan diversifikasi ragam Produk Non Bioteknologi (lokasi)		40	50	60	75								
			Jumlah lokasi pembinaan diversifikasi ragam produk bioteknologi (lokasi)		20	22	25	30								
			Nilai Produk Bioteknologi Kelautan (Rp. milyar)		220	460	610	880								
		Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan (dokumen)		1	1	1	1	1							
032	08	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan														
		Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan	Data dan statistik usaha dan investasi hasil kelautan dan perikanan yang akurat (dokumen)		5	5	5	5	5							
			Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan komitmen dalam rangka mendorong investasi (unit usaha)		150	160	175	200								
			Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha)		500	550	650	800								

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
			Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang dibentuk dalam rangka realisasi invetasi (lembaga usaha)	80	88	100	115							
			Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan dan difasilitasi dalam rangka realisasi invetasi (lembaga usaha)	600	650	700	750							
			Jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha)	500	550	650	800							
			Jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi (unit usaha)	100	115	130	150							
			Jumlah tenaga kerja yang dibina dalam rangka menuju usaha yang feasible (orang)	800	850	925	1000							
		Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Direktorat Pengembangan Investasi	Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Investasi (Dokumen)	1	1	1	1							
032	08	5279	Pengujian Penerapan Hasil Perikanan					23,70	34,61	56,15	76,25	90,50	294,05	
		Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan	Uji terap inovasi teknologi hasil kelautan dan perikanan (ragam)	10	12	14	16							
			Uji terap inovasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (ragam)	3	4	5	5							
			Jumlah penyajian bahan RSNi pengolahan dan pemasaran (bahan RSNi)	5	5	5	5							
			Jumlah produk bersertifikat SNI (Produk)	7	9	11	13							
			Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk perikanan (Data)	600	600	600	600							
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi inkubasi bisnis/pengembangan usaha (UMKM)	9	13	15	15							
			Masyarakat yang menerima informasi inovasi teknologi BBP2HP	2000	2500	3000	3500							
		Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. BBP2HP	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BBP2HP (dokumen)	1	1	1	1							

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
032	08	5280	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP					155,95	111,30	185,00	222,00	260,00	934,25	
		Tervujudnya ASN DJPDSKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	75	78	80	82							
		Tersedianya manajemen pengetahuan yang mahlid dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50	60	70	80							
		Tervujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kinerja reformasi birokrasi DJPDSKP	BB	BB	A	AA							
		Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran DJPDSKP (%)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat baik (> 90)	Sangat baik (> 90)							
			Opini atas laporan keuangan DJPDSKP	WTP	WTP	WTP	WTP							
032	09	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT						1.382,36	1.411,47	1.994,63	2.207,69	2.434,11	8.185,19	
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petambak garam	Nilai Tukar Petambak Garam	102	103	104	105							
		Meningkatnya kualitas garam rakyat	Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan (%)	60	65	70	75							
		Tervujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	Jumlah Produksi Garam Rakyat	3,6	3,8	4,1	4,5							
			Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal di PPK yang direvitalisasi (komunitas)	5	8	10	15							
			Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan)	3	6	9	12							
			Jumlah Pulau-pulau kecil yang Mandiri (pulau)	10	15	25	31							
			Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan efektifitas pengelolannya (kawasan)	28	30	33	35							
			Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha)	17,1	17,9	18,8	20							
			Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis)	15	19	19	20							
			Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Kawasan)	55	60	75	85							
			Perairan laut NKRI yang memiliki Dokumen RTRLN	1	-	-	-							
			Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4	6	8	10							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
032	09	2362	Perindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keekaragaman Hayati Laut	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zona dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan)	40	42	47	53					274,52	305,42	335,96	369,56	1.285,47
			Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	Penambahan luas kawasan Konservasi (Juta Ha)	0,6	0,8	0,9	1,2									
			Terdapatnya pengelolaan jenis ikan terancam punah yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkatkan kualitas lingkungannya melalui upaya pengelolaan efektif (kawasan)	28	30	33	35									
			Terdapatnya pengelolaan jenis ikan terancam punah yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Kawasan Konservasi perairan yang difasilitasi upaya pemantaannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat (kawasan)	20	25	30	35									
			Terdapatnya pengelolaan jenis ikan terancam punah yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis)	15	19	19	20									
			Terdapatnya pengelolaan jenis ikan terancam punah yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jumlah kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (kelompok/masyarakat)	5	10	15	20									
			Terdapatnya pengelolaan jenis ikan terancam punah yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Persentase penatausahaan Direktorat KKH yang tepat waktu (%)	100	100	100	100									
032	09	2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Persentase Kualitas Garam RP1 terhadap total keseluruhan (%)	60	65	70	75					143,69	216,79	238,47	262,32	861,28
			Terselenggaranya produksi dan usaha petambak garam rakyat	Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha)	26.000	27.000	28.500	30.222									
			Tersedianya pemanfaatan air laut Non energi dan BMKT	Jumlah sarana niaga garam rakyat (unit)	11	13	15	17									
			Terdapatnya pipa/kabel bawah laut untuk pengembangan ekonomi	Jumlah kawasan yang dikelola untuk pemanfaatan Air Laut Non Energi dan BMKT	13	19	25	31									
			Terdapatnya pengelolaan kawasan wisata bahari	Jumlah Kawasan alur Laut yang ditata untuk pemasangan Pipa dan/kabel Kabel Bawah Laut (kawasan)	60	3	5	7	9								
			Terselenggaranya penatausahaan Direktorat JK yang tepat waktu	Jumlah Kawasan yang dibangun sarana prasarana untuk Wisata Bahari (kawasan)	3	6	9	12									
			Terselenggaranya penatausahaan Direktorat JK yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat JK yang tepat waktu (%)	100	100	100	100									

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
032	09	2364	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Bertambahnya ekonomi di Pulau-Pulau Kecil Terluar	25	31	31	31					291,85	441,98	486,18	534,80	1.864,75
			Terdapatnya peraturan Pulau-Pulau Kecil Terluar	Jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasaranya (pulau)	20	35	55	61									
			Terdapatnya investasi di Pulau-Pulau Kecil	Jumlah gugus pulau kecil yang diinvestasikan dalam menunjang pengembangan ekonominya (pulau)	10	15	20	25									
			Tervalidasiya pembakuan nama pulau kecil	Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi Pembakuan Namanya (Pulau)	500	250	150	150									
			Revitalisasi masyarakat adat, tradisional, dan lokal (komunitas)	Jumlah komunitas masyarakat adat, tradisional dan lokal di PPK yang direvitalisasi (komunitas)	5	8	10	15									
			Terselenggaranya penatausahaan Direktorat PPK yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat PPK yang tepat waktu (%)	100	100	100	100									
032	09	2365	Pendayagunaan Pesisir	Terdapatnya kawasan pesisir yang direstorasi	5	10	20	30					422,58	637,04	729,75	810,72	2.600,09
			Terdapatnya sarana dan prasarana di kawasan pesisir	Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan)	8	12	14	16									
			Rehabilitasi kawasan pesisir di pantura Jawa	Jumlah kawasan pesisir yang meningkatkan ketangguhannya (kawasan)	4	4	4	4									
			Terselenggaranya penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang tepat waktu	Jumlah kawasan pesisir yang meningkatkan direhabilitasi :	4.000.000	3.000.000	3.000.000	-									
				- Bakau (Batang)	15	-	-	-									
				- Sabuk Pantai (km)	50	-	-	-									
				- Reayasa Hybrid (km)	100	100	100	100									

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
032	09	2366	Perencanaan Ruang Laut	Perairan laut NKRI yang memiliki Dokumen RTRLN	1	-	-	-	-	55,43	96,57	101,83	109,67	363,51
			Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Laut Nasional											
			Tersusunnya rencana zonasi di wilayah laut, sebat, dan teluk antar wilayah	Jumlah wilayah laut antar wilayah KSN dan KSNIT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	29	40	42	43						
			Tersusunnya dokumen masterplan Kawasan Strategis Nasional / Tertentu	Jumlah KSN dan KSNIT yang memiliki masterplan dan bisnisplan ditetapkan melalui peraturan perundangan	11	10	8	5						
			Tervaluasinya substansi dan akselerasi legalitas dokumen RZWP3K	Jumlah Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	10	15	15	20						
			Tervaluasinya substansi dan akselerasi legalitas dokumen RZWP3K	Tersedianya data dan sistem informasi perencanaan ruang laut	15	20	25	30						
			Terselenggaranya penatausahaan Direktorat PRL yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat PRL yang tepat waktu (%)	100	100	100	100						
032	09	2367	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut							223,40	286,81	315,50	347,05	1.210,10
			Tersedianya ASN KKP yang kompeten dan profesional	Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional lingkup DJPRL (%)	<14%	<13%	<12%	<10%						
			Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Indeks Pemanfaatan Informasi DJPRL Berbasis TI (%)	>75%	>80%	>80%	>85%						
			Terselenggaranya Reformasi Birokrasi	Nilai Penerapan RB DJPRL	A	A	A	AA						
			Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai SAKIP DJPRL	A	A	AA	AA						
			Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Nilai efisiensi anggaran DJPRL	>95%	>95%	>95%	>95%						
				Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPRL (%)	100	100	100	100						
				Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPRL (%)	100	100	100	100						

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
032	10	PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								1.529,54	1.838,30	2.225,00	2.370,00	2.530,00	10.492,85
		Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70,0%	73,0%	76,0%	81,0%	87,0%							
			Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	56,6%	65,9%	71,2%	81,4%	83,4%							
			Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	82,0%	85,0%	87,0%	90,0%	92,0%							
			Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan di wilayah perbatasan	-	73,0%	76,0%	81,0%	87,0%						
				Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang menerima bantuan	340 kelompok	510 kelompok	680 kelompok	850 kelompok	1020 kelompok						
032	10	2350	Pengoperasian Kapal Pengawas							497,20	456,15	899,00	1.000,00	1.100,00	3.951,41
			Terselenggaranya Pengawasan WPP-NRI dari kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP yang profesional dan partisipatif	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU fishing</i> dan merusak SDKP di WPP - NRI	280 hari	"144 hari"	"150 hari"	"150 hari"	"150 hari"						
				Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU fishing</i> dan merusak SDKP di WPP - NRI	60 Hari	120	250 hari	250 hari	250 hari						
				Jumlah wilayah laut perbatasan yang diawasi untuk mencegah nelayan pelintas batas	3 wilayah	4 wilayah	5 wilayah	6 wilayah	7 wilayah						
				Jumlah Awak Kapal Pengawas yang mempunyai dan memenuhi kualifikasi	108 orang	124 orang	144 orang	250 orang	300 orang						
				Jumlah kapal pengawas yang siap operasi	27 Unit	35 unit	36 unit	44 unit	49 unit						
			Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat	Persentase penatausahaan Direktorat Kapal Pengawas yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
032	10	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan							27,77	35,55	56,00	60,00	70,00	249,32
			Penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan terpadu	Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	82	85	88	89	90						

KODE KL	PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
				Persentase penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	82	85	88	89	90							
				Persentase Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang selesai disidik (P-21) yang dapat dipantau proses tindak lanjutnya (%)	80	82	88	89	90							
			Terlindungnya nelayan RI pelintas batas dan diduga melakukan pelanggaran perikanan di negara lain	Persentase Nelayan Indonesia yang difasilitasi pemulungannya karena terindikasi melakukan lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di negara lain	80	82	85	88	90							
			Koordinasi antar aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah wilayah pebatasan yang nelayannya difasilitasi dan diberikan pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (Provinsi)	6	7	8	9	10							
			Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang kompeten dan aparat penegak hukum di bidang KP yang meningkat kemampuan teknis di bidang Kelautan dan perikanan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan yang Terbentuk dan Terselenggara	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi							
			Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat	Persentase data dan informasi TPKP nasional yang terintegrasi dengan instansi terkait, akurat dan handal	75%	85%	90%	92%	95%							
			Terselenggaranya pengawasan kawasan konservasi dan ekosistem perairan yang profesional dan partisipatif	Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org							
				Jumlah aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang direkrut/ditingkatkan pengetahuan teknis bidang kelautan dan perikanan	50 org	60 org	70 org	80 org	85 org							
				Persentase penatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100							
032	10	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		22,99	19,57	55,00	60,00	70,00	225,88						
				Terselenggaranya pengawasan kawasan konservasi dan ekosistem perairan yang profesional dan partisipatif	55%	60%	70%	80%	90%							

KODE KL	PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)		
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
				Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	8 jenis	8 jenis	10 jenis	14 jenis	16 jenis								
				Persentase ketepatan pelaku pemantauan jasa kelautan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	45,0%	55,0%	60,0%	75,0%	80,0%								
				Persentase ketepatan pelaku usaha pemanfaatan pesisir terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	30,0%	35,0%	45,0%	55,0%	65,0%								
				Persentase ketepatan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	35,0%	40,0%	55,0%	65,0%	75,0%								
				Jumlah wilayah yang diadakan sosialisasi peraturan dan meningkatkan ketepatan dalam pemanfaatan SDKP (provinsi)	34	34	34	34	34								
				Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)	100	100	100	100	100								
				Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%								
002	10	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan		42,19	26,62	85,00	90,00	100,00	345,66							
				Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang profesional dan partisipatif	92,95%	93,37%	95,19%	97,07%	99,01%								
				Persentase ketepatan unit usaha pengolahan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	87,04%	88,29%	89,54%	90,79%	92,04%								
				Persentase ketepatan unit usaha budidaya perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	77,00%	82,23%	84,75%	88,96%	92,04%								
				Persentase ketepatan impor/eksportasi ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%								

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Kelompok Masyarakat Pengawas yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP	1128 kelompok	1639 kelompok	1685 kelompok	1732 kelompok	1780 kelompok						
		Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat	Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
032	10	2354	Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan							768,85	920,00	930,00	940,00	4.309,15
			Terpenuhiya infrastruktur, Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP terintegrasi dan tepat waktu	7 Sistem	4 Sistem	5 Sistem	5 Sistem	5 Sistem						
			Jumlah sistem pengawasan SDKP berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi	3	-	-	-	-						
			a. Regional Monitoring Center(RMC)	2	2	1	1	1						
			b. Surat Keterangan Aktifasi Transmitter (SK47) on /line	2	1	2	2	2						
			c. Sistem Integrasi	-	1	1	1	1						
			e. Automatic Identification System (AIS)	-	1	1	1	1						
			f. Radar Pantai	-	1	1	1	1						
			Jumlah pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu	104	56	45	38	67						
			a. Kapal Pengawas	8	3	6	6	9						
			- Tipe A, panjang > 50 meter	4	2	2	1	-						
			(lanjutan)											
			- Tipe B, panjang > 40 s.d 50 meter	2	1	2	4	3						
			- Tipe C, panjang > 30 s.d 40 meter	2	0	4	1	6						
			- Tipe D, panjang > 20 s.d 30 meter	-	-	-	-	-						
			- Tipe E, panjang > 16 s.d 20 meter	-	-	-	-	-						
			b. Speedboat Pengawas	50	20	10	10	10						
			c. Kantor Pengawas	4	10	2	3	11						
			d. Dermaga kapal pengawas	1	1	2	2	2						
			e. Bangunan Operator	16	10	6	4	17						
			f. Gudang Barang Bukti	2	10	2	1	1						
			g. Gudang Logistik Kapal Pengawas	0	0	2	2	2						
			h. Rumah Penampungan ABK Non Yustisia	0	0	0	1	1						

KODE KL PROG KEG	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
			i. Pos Pengawasan	17	0	11	8	13						
			j. Pesawat Patroli Pengawasan (Patrol Planes)		2	3 baru dan 2 lanjutan	3 lanjutan	0						
			k. Shelter (Komplek Hunian) ABK Kapal Pengawas	0	0	1	1	1						
			i. Pustal	6	0	0	0	0						
			Terselenggaranya Pemantauan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif											
			Terselenggaranya Pemantauan pengelolaan sumber daya Perikanan yang efektif	75%	80%	85%	90%	95%						
			Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat	-	75%	80%	85%	90%						
032	10	2355	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP							170,54	692,79	210,00	230,00	1.594,85
			Terwujudnya ASN DJPSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	<15%	<14%	<13%	<12%	<10%						
			Jumlah pengembangan SDM pengawasan yang kompeten sesuai kebutuhan	179 orang	200 orang	225 orang	250 orang	275 orang						
			Jumlah pejabat fungsional pengawas SDKP	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang						
			Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	>75%	>75%	>80%	>80%	>85%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		Tervujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPSDKP	BB	BB	A	A	A							
			Nilai SAKIP DJPSDKP	A	A	A	AA	AA							
			Jumlah Kerjasama nasional dan Internasional bidang pengawasan SDKP yang disepakati	2	2	2	2	2							
		Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai kinerja anggaran lingkup DJPSDKP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)							
		Terpenuhi belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPSDKP (%)	100%	100%	100%	100%	100%							
			Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPSDKP (%)	100%	100%	100%	100%	100%							
032	11	PROGRAM	KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN							491,35	669,95	800,00	1.200,00	1.500,00	4.679,01
			Tervujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP		8	9,5	11,00	12							
			Tervujudnya Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan dalam ekspor, impor dan antar area		73	76	81	87							
			Tervujudnya pencegahan penyebaran HPK, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan		≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10							
				550	575	600	625	650							
				80	84	88	92	96							
			Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melalui kajian analisis resiko (jenis)	5	10	15	20	25							
			Peningkatan Nilai ekspor hasil perikanan melalui sertifikasi karantina (%)	10,38	11,73	11,95	12,00			159,53	154,41	251,68	398,68	490,84	1.536,88
032	11	3988	Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinahan dan Keamanan Hayati Ikan												
			Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinahan, jaminan mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif	77	80	88	92	96							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
			Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinahan dan Keamanan hayati Ikan yang diselesaikan (%)	90	95	95	95	95							
			Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif	46	56	66	76	86							
			Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi)	184	339	342	368	460							
			Jumlah drat peraturan perundangan undangan bidang perkarantinahan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (dokumen)	2	2	2	3	3							
			Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)	31.500	32.500	33.500	34.500	35.000							
			Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat)	137.000	139.000	141.000	143.000	144.000							
			Jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (unit)	220	230	240	250	260							
			Jumlah Negara yang harmonis dalam standar penerapan sistem perkarantinahan ikan (negara)	2	2	3	4	4							
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit)	75	175	315	420	500							
			Persentase penatausahaan Pusat Karantina Ikan dan Keamanan Hayati Ikan yang tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%							
032	11	3989	Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							36,17	69,65	60,21	148,63	211,53	510,56
			Terselenggaranya sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar		75	77	79	80							
			Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran <i>Marine Biotoxin</i> dan Logam Berat (lokasi)	3	5	7	9	10							
			Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang terregistrasi negara mitra (unit)	125	150	200	250	300							
			Lokasi yang termonitor: kesehatan ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)	25	27	29	31	32							
			Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor	82.000	82000	84.000	86.000	87.000							
			Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	22	22	24	26	28							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
032	3990	Meningkatnya sertifikat jaminan mutu (HACCP) pada UPI	Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutunya dan keamanan hasil perikanan	Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan	1.161	1.300	1.325	1.355	1.395	29,56	138,39	98,13	156,99	196,66	571,33		
		Tersedianya kebijakan mutu dan keamanan hasil perikanan yang partisipatif		1	1	2	2	2									
		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif		90	95	95	95	95									
		Terselenggaranya penatausahaan pusat sertifikasi mutu		100	100	100	100	100									
032	11	3990	Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutunya dan keamanan hasil perikanan														
			Terselenggaranya sistem manajemen dan kerja sama perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan mutu		12	13	14	15	16								
			Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 (unit)	10	12	13	14	15									
			Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (unit)	15	17	19	21	22									
			Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium pengujian	20	23	26	28	29									
			Jumlah Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (unit kerja)	180	200	220	240	240									
			Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi (orang)	3	4	5	6	7									
			Jumlah RSM metode pengujian	1.000	1.100	1.200	1.300	1.350									
			Jumlah jenis pengujian yang dilakukan uji banding	4	4	4	4	4									
			Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi	34	35	36	37	38									
			Jumlah negara yang harmoni/kerjasama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval)														

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
032	11	3991	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah perjanjian kerja sama antar lembaga di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan	3	5	7	8									
				Jumlah kerjasama bilateral, regional, multilateral di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan (paper)	4	4	5	5									
				Tersedianya kebijakan publik perkarantinaan, keamanan hayati, mutu dan keamanan hasil perikanan	3	3	3	4	4								
				Terselenggaranya sistem pengendalian dan pengawasan	1	2	3	3	3								
				Terselenggaranya penatausahaan pusat manajemen mutu		73%	76%	81%	87%								
032	11	3991	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	100	100	100	100	100	266,09	307,50	388,98	495,70	600,97	2.060,24			
			Terdapatnya ASN BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian	65	75	77	80	85									
			Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	40%	50%	60%	70%	100%									
			Terdapatnya birokrasi BKIPM yang efektif efisien, dan berorientasi pada layanan prima	BB	BB	A	A	AA									
			Terkeolahnya anggaran pembangunan secara efisien dan akurat	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%									

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp MILIAR)				TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp MILIAR)		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019	
KL	PROG/KEG	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai BKIPM (%) Persentase pemenuhan layanan perkantoran BKIPM (%)	100	100	100	100	100							
				100	100	100	100	100							

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI